



Siaran Pers

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 791/sipers/A6/XI/2025

Mewujudkan Pemerataan Pendidikan: Strategi Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Kawasan 3T

Tangerang, 15 November 2025 — Di tengah semangat transformasi pendidikan yang mewarnai Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Sekolah Terpadu tampil sebagai pionir digitalisasi pembelajaran di kawasan tersebut. Antusiasme murid yang kini berinteraksi dengan Papan Interaktif Digital/*Interactive Flat Panel* menciptakan atmosfer baru dalam dunia pendidikan daerah.

Ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengunjungi sekolah yang terdiri dari 3 (tiga) Jenjang Satuan Pendidikan, yaitu SDN 028 Sungai Kunjang, SMPN 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda ini pada medio September 2025, sambutan hangat dari murid dan guru bukan sekadar formalitas, melainkan ekspresi nyata dari harapan besar mereka terhadap program revitalisasi sekolah yang tengah membawa perubahan signifikan dalam cara mengajar dan belajar.

"Menteri Mu'ti menyaksikan secara langsung proses pembelajaran menggunakan dengan Papan Interaktif Digital/*Interactive Flat Panel*, yang membuat suasana kelas jadi lebih hidup," tutur Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin saat ditemui ketika hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah: Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Tangerang, (13/11).

Armin menambahkan program digitalisasi pembelajaran ini sangat positif, terutama bagi *remote area* yang membutuhkan infrastruktur digital dan asrama untuk siswa di wilayah 3T—Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. "Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) kami mencapai 98,75%, tantangan murid yang *dropout* masih ada karena jarak tempuh yang jauh. Kami berharap bantuan dari pusat dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan menyediakan fasilitas yang memadai," ungkapnya.

Kisah serupa datang dari ujung timur Indonesia. Provinsi Maluku, yang terdiri dari ratusan pulau dengan kondisi geografis menantang, kini merasakan dampak nyata dari program revitalisasi. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, yang jadi perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di acara Rakor, menjelaskan bagaimana transformasi ini mengubah wajah pendidikan di wilayahnya.

"Digitalisasi menjadi penopang utama pendidikan kami. Dengan program revitalisasi dari pemerintah pusat, kami telah melayani sekitar 100 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini membuat sekolah-sekolah di daerah perbatasan kami kini setara dengan sekolah-sekolah di kota besar.

Guru-guru dapat mengajar dengan sukacita karena memiliki sarana yang memadai, dan informasi pembelajaran tersebar merata ke seluruh kepulauan. Harapan kami, program ini terus berlanjut sehingga



Siaran Pers

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

lebih dari 400 sekolah di Maluku dapat terlayani secara optimal untuk kepentingan Indonesia, Maluku, dan generasi mendatang," tegas Sarlota.

Selanjutnya saat menyampaikan sambutan di acara Rakor, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menegaskan bahwa target revitalisasi dan digitalisasi ditetapkan selesai pada 15 Desember 2025, termasuk pelaksanaan dan pelaporan.

"Namun, kami memahami bahwa beberapa sekolah atau daerah memiliki kondisi khusus—mungkin akses geografis yang sulit atau kendala cuaca ekstrem. Untuk kasus seperti ini, dispensasi akan diberikan setelah melalui proses monitoring dan evaluasi yang ketat. Yang penting, bantuan ini tepat sasaran dan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan mendapat prioritas," sambung Menteri Mu'ti.

Dukungan tidak hanya datang dari eksekutif, tetapi juga dari lembaga legislatif. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program ini melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Komisi X siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan berjalan lancar. Kami akan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, melakukan pengawasan agar dana APBN digunakan secara transparan, dan mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk membangun pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan," pungkas Hetifah.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id

X: x.com/Kemdikdasmen

Instagram: [instagram.com/kemendikdasmen](https://www.instagram.com/kemendikdasmen)

Facebook: [facebook.com/kemendikdasmen](https://www.facebook.com/kemendikdasmen)

YouTube: KEMDIKDASMEN

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id

Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua

#KemendikdasmenRamah